



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Maret 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas Rekrutmen CPNS Tahun 2021; dan 2. Membahas Isu-isu Aktual Lainnya.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 33 (tiga puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi C. Kepala Badan Kepegawaian Negara D. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda membahas rekrutmen CPNS Tahun 2021 dan membahas isu-isu aktual lainnya, hari Rabu, 24 Maret 2021, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda membahas rekrutmen CPNS Tahun 2021 dan membahas isu-isu aktual lainnya, yaitu:

1. Aparatur Negeri Sipil (ASN), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur oleh PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. ASN bertugas untuk mengisi jabatan pemerintah dan melaksanakan tugas pemerintah.
2. Kebutuhan ASN (PNS/PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun, dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
3. Rencana penetapan kebutuhan ASN 2021: Pusat sebanyak 69.684 dan Daerah sebanyak 671.867

## III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda membahas rekrutmen CPNS Tahun 2021 dan membahas isu-isu aktual lainnya, yaitu:

1. Terkait pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021, Komisi II DPR RI mendesak Kementerian PANRB meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, khususnya 10 Pemerintah Kab/Kota yang belum mengajukan dan 49 Pemerintah Kab/Kota yang belum melengkapi dokumen, dalam penyusunan kebutuhan pengadaan CPNS dan PPPK agar sesuai dengan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sehubungan dengan masih adanya selisih jumlah kebutuhan ASN dengan jumlah rencana penetapan formasi ASN tahun 2021 sebesar 533.836.
2. Sebagai upaya mewujudkan ketersediaan formasi bagi 1 juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk memprioritaskan THK2 di dalam pemenuhan formasi tersebut.

3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN mengalokasikan formasi bagi tenaga honorer non guru terutama yang membantu pelaksanaan program-program pembangunan strategis nasional.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memberikan informasi yang transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021 kepada masyarakat, termasuk meningkatkan layanan posko aduan atau *help desk* di setiap Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
5. Komisi II DPR RI meminta BKN memastikan kesiapan sarana, prasarana, sistem, dan ketersediaan SDM, agar proses penerimaan calon ASN tahun 2021 berjalan lancar, tertib dan kondusif, sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Komisi II DPR RI Bersama Kementerian PANRB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktek penipuan dan/atau percalo-an dalam proses penerimaan CPNS.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.54 WIB.

Jakarta, 24 Maret 2021

KETUA RAPAT

  
H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG  
A-270